

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tahun 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 26 Februari 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dr. Agus Sugianto Zein, S.Pd., M.Si
NIP. 196408141897031012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	45
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang Persandian.

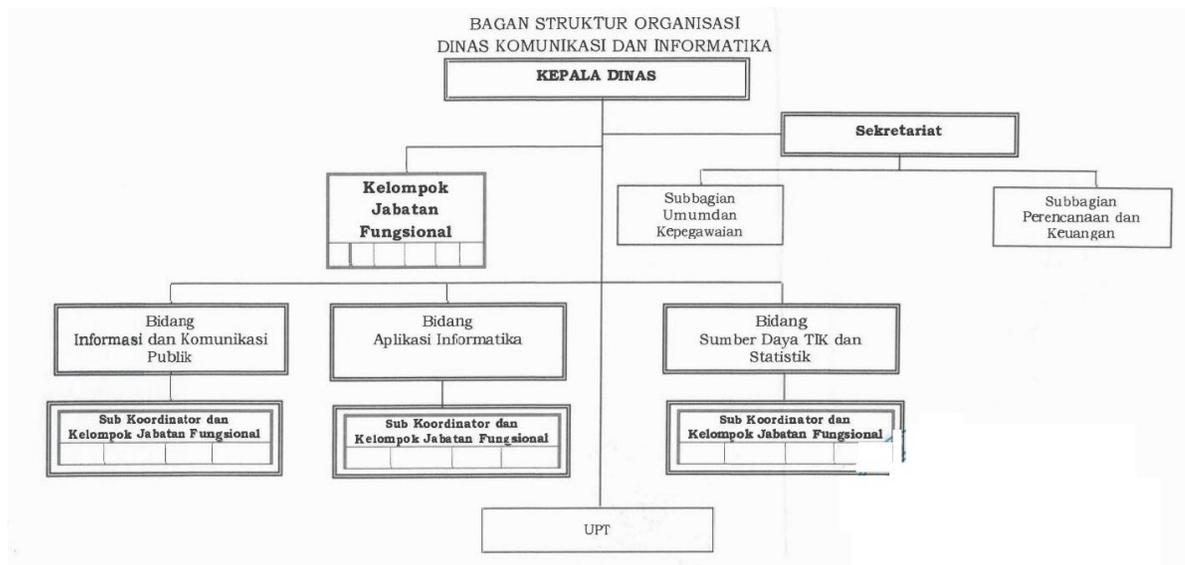
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bi dang Persandian;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .

Gambar 1.1.



B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. SDM aparatur yang ada belum memiliki kepemimpinan (leadership commitment) yang memadai untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sektoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal;
2. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsive;
3. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multi media, desain grafis, jurnalistik, serta dasar-dasar ilmu komunikasi lainnya.;
4. Regulasi dan peraturan-perundangan yang ada terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum ditindaklanjuti dengan pedoman-pedoman teknis seperti standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses bisnis SPBE berbagai macam layanan terhadap pengguna perlu diatur dengan SOP untuk memperjelas proses pelayanan;
5. Kelembagaan TIK yang sudah terbentuk belum sepenuhnya dipahami maksud dan tujuannya, akibatnya kelembagaan yang sedianya untuk mempertegas otoritas dan disposisi tidak berjalan. Hal ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi;

6. Data Center dan Disaster Recovery Center belum memenuhi kapasitas maksimal untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun masyarakat;
7. Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social;
8. Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan menara telekomunikasi;
2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penataan terhadap peraturan perundangundangan bidang Komunikasi;
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi.

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022
8. Peraturan Bupati Bangkalan No 70 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7 Seri A) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 2 Seri A)

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA . Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA merupakan hasil

kesepakatan bersama antara DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan keagamaan.
2. Menyelenggarakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
3. Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA mengacu pada Misi ke-2, yaitu *“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”*.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	5.1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK	Persentase layanan akses internet, intranet,	0	30	40	50	60

	daerah Kabupaten Bangkalan		untuk akses intra Pemerintah Daerah	dan komunikasi intra Pemerintah Daerah					
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	5.2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	0	40	60	80	90
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	5.3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi	Jumlah jenis data statistik yang tersedia	0	20	30	40	55
6	Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	6.1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	0	75	77	80	83

Sumber : Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	1.1 Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	prosentase	infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	DISKOMINFO Bangkalan
2	Terpenuhinya prosentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	2.1 Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	prosentase	Konten informasi yang dipublikasikan	jumlah konten informasi yang dipublikasikan	DISKOMINFO Bangkalan
3	Terpenuhinya prosentase jumlah jenis data statistik yang tersedia	3.1 Persentase jumlah jenis data statistik yang tersedia	prosentase	Jenis data statistik yang tersedia	Jumlah jenis data statistik yang tersedia	DISKOMINFO Bangkalan

1	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan	1.1	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	indeks	Operasional pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	DISKOMINFO Bangkalan
6	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan	6.1	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	prosentase	Operasional kinerja Diskominfo	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO Bangkalan
5		5.1	Indeks SPBE	indeks	Indeks SPBE	Indeks SPBE	DISKOMINFO Bangkalan

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	5.1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	prosentase	60
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	5.2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	prosentase	90
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah	5.3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal,	Persentase jumlah jenis data statistik yang tersedia	prosentase	55

	Kabupaten Bangkalan		Efektif Dan Efisiensi			
6	Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	6.1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	indeks	83

Sumber : Rencana Kerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 11 bulan November tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	60
2	Terpenuhinya prosentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	90
3	Terpenuhinya prosentase jumlah jenis data statistik yang tersedia	Jumlah jenis data statistik yang tersedia	55
4	Meningkatkannya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	83
		Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	77
		Indeks SPBE	3.2

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:

Tabel 2.5**Program dan Kegiatan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun
2022**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi aplikasi TNDE	2 kegiatan
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi keamanan informasi	2 kegiatan
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	9 kegiatan
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan statistik sektoral di lingkup daerah / kabupaten kota	5 kegiatan

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat	100 %
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	80 %
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	80 %
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	80 %
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80 %
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	80 %

		pemerintah daerah yang terlaksana	
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	60 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	60 %
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah berita dipublikasikan	90 %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan	55 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah	83 %
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	3 aplikasi
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan	sosialisasi aplikasi integrasi	1 kegiatan

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lisesnsi keamanan website	1 aplikasi
2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat keamanan yang dihasilkan	1 jenis
1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	85 orang
1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	3 media
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	12 bulan
3	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah issue yang berhasil di angkat	12 kali
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah permohonan data dan informasi yang ditindaklanjuti	12 kali
4	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Operasional komisi infomasi	12 bulan

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen serta data statistik sektoral daerah yang tersajikan	1 kegiatan
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah operator data statistik yang dilatih	61 SKPD
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	61 SKPD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun	1 dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang disusun	1 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan	1 dokumen

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 laporan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	61 orang
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 laporan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	66 laporan
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	14 laporan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	128 buah
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersampainya informasi tentang peraturan perundang-undangan tentang cukai rokok kepada masyarakat, KIM, generasi milenial, relawan TIK dan	5 kegiatan

		wartawan di kabupaten bangkalan	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5 unit
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 kegiatan
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 jenis
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5 jenis
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 kali
1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 unit
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 jenis
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jens

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 jenis
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penyediaan pelayanan umum kantor	5 jenis
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	21 unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 jenis
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah website resmi yang dikelola	2 website
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah jaringan yang terpasang	1 paket

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	200 menara
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lisensi aplikasi yang dihasilkan	1 aplikasi
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat yang dihasilkan	12 jenis

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	83	83,72	100.87	Tinggi	DISKOMIN FO Bangkalan
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	60%	82.51	137.51	Tinggi	DISKOMIN FO Bangkalan
2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	90%	56.22	62.47	Rendah	DISKOMIN FO Bangkalan
3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi	Prosentase jumlah jenis data statistik yang tersedia	55%	29	52.73	Rendah	DISKOMIN FO Bangkalan

Rata - Rata Pencapaian Indikator Kinerja	86.04%	Tinggi	DISKOMIN FO Bangkalan
--	--------	--------	-----------------------------

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian indikator kinerja yaitu 78,31% dengan predikat kinerja sesuai kategori "**Tinggi**" dengan rincian sebagai berikut :

- Indikator kinerja "Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan" dengan persentase 83,72% dengan predikat "**Tinggi**". Pengukuran indeks kepuasan internal ini didapat dari hasil survey yang dilakukan dengan responden ASN internal Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelayanan kesekretariatan.
- Indikator kinerja "Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah " dengan persentase sebesar 82,51 % dengan predikat "**Tinggi**". Hal ini mendapat predikat sangat tinggi dikarenakan.
- Indikator kinerja "Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan" dengan persentase sebesar 62,47% dengan predikat "**Rendah**". Hal ini mendapat predikat rendah dikarenakan Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social.
- Indikator kinerja "Prosentase jumlah jenis data statistik yang dihasilkan " dengan persentase sebesar 52,73% dengan predikat "**Rendah**". Hal ini mendapat predikat rendah dikarenakan penyediaan data sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun 2022		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah				60	82.51	137.51
2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan				90	56.22	62.47
3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi	Jumlah jenis data statistik yang tersedia				55	29	52.73
1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan				83	83.72	100.81
6	Meningkatnya kinerja urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika				77	59.72	77.56
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	Indeks SPBE			1.62	3.2	1.89	59.06

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	82.51	70	117.88 %
2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah berita dipublikasikan	56.22	100	56.22 %
3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi	Prosentase jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan	29	60	48.33 %
1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	83.72	85	98.49 %
6	Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	59.72	80	74.65 %
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	Indeks SPBE	1.89	3.5	59.06 %

Uraian penjelasan tabel:

- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja “Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah” sebesar 117.88 %.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja “Persentase jumlah berita dipublikasikan” sebesar 56.22%.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja “Prosentase jumlah data statistik sectoral yang dihasilkan” sebesar 48.33%.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja “Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan” sebesar 98.49%.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika” sebesar 74.65%.
- Tingkat Kemajuan Indikator Kinerja “Indeks SPBE” sebesar 59.06%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	82.51	-	-
2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	56.22	-	-
3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi	Jumlah jenis data statistik yang tersedia	29	-	-

1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	83.72	-	-
6	Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	59.72	-	-
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	Indeks SPBE	1.89	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	60	82.51	137.51	Program, kegiatan, sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Untuk selanjutnya pelayanan akses internet, intranet dan komunikasi intra PD dipertahankan dan terus ditingkatkan
2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah konten informasi yang dipublikasikan	90	56.22	62.47	Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi	Peningkatan kapasitas media radio, cetak, interpersonal, tradisional, online, dan media baru lainnya.

						penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social.	
3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi	Jumlah jenis data statistik yang tersedia	55	29	52.73	Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama	Penyusunan data statistik sektora sebagai upaya meningkatkan kualitas data statistik sektoral
1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	83	83.72	100.87	Pengukuran indeks kepuasan internal ini didapat dari hasil survey yang dilakukan dengan responden ASN internal Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelayanan kesekretariatan	Untuk selanjutnya pelayanan internal kesekretariatan akan dipertahankan dan terus ditingkatkan
6	Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunik	77	62.07	80.61	Program, kegiatan, sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Program, kegiatan dan sub kegiatan tetap sesuai dengan yang ada pada renstra Diskominfo dengan

		asi dan Informatika					menyesuaikan anggaran yang ada
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	Indeks SPBE	3.2	1.89	59.06	Terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi dan indikator tidak hanya di Diskominfo, melainkan kinerja dari beberapa OPD	Peningkatan capaian indikator layanan SPBE

Uraian penjelasan tabel:

- Capaian Indikator Kinerja “Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah” sebesar 98 %.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase jumlah berita dipublikasikan” sebesar 56.22%.
- Capaian Indikator Kinerja “Prosentase jumlah data statistik sectoral yang dihasilkan” sebesar 48.33%.
- Capaian Indikator Kinerja “Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan” sebesar 98.49%.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika” sebesar 80.61%.
- Capaian Indikator Kinerja “Indeks SPBE” sebesar 59.06%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	82.51	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase terintegrasi sub domain dengan domain resmi pemerintah	137.51	Menunjang
1				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan	100	

				Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelengga raan Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota		
1				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah website resmi yang dikelola	100	
1				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan yang terpasang	8.33	
1				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah menara telekomunik asi yang diawasi dan dikendalikan	8.33	
1				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lisensi aplikasi yang dihasilkan		
1				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat yang dihasilkan		
2				Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanan ya sosialisasi aplikasi TNDE	100	

1				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	33.33	
1				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	sosialisasi aplikasi integrasi	7200	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	161.67	
1				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi keamanan informasi	100	
2				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lisenensi keamanan website	100	
2				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat keamanan yang dihasilkan		
	Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase jumlah berita dipublikasikan	56.22	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah berita dipublikasikan	107.04	Menunjang
1				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100	

1				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	100	
1				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	100	
2				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	100	
3				Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah issue yang berhasil di angkat	100	
3				Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	100	
4				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Operasional komisi informasi	100	
	Tersedianya statistik daerah	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan	29	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan	158.18	Menunjang
1				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan statistik sektoral di lingkup daerah / kabupaten kota	100	
1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen serta data statistik sektoral daerah yang tersajikan	200	

2				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah operator data statistik yang dilatih	73.77	
3				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	100	
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	56.22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah	114.63	Menunjang
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.88	
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	98.53	
3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat	0	
4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	116.21	
5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	107.87	
6				Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan	123.91	

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana		
7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	110.66	
8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	111.69	
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun	100	
3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang disusun	100	
4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun	100	
5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang disusun	100	
6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	100	

					realisasi kinerja SKPD yang disusun		
7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	
1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	100	
3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	100	
1				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	100	
1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	82.03	
3				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersampainya informasi tentang peraturan perundang-undangan tentang cukai rokok kepada masyarakat, KIM, generasi milenial,	100	

					relawan TIK dan wartawan di kabupaten bangkalan		
1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	80	
2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50	
3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	100	
4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200	
5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	120	
6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	
1				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100	
2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	100	

1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100	
2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100	
3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penyediaan pelayanan umum kantor	100	
1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	100	
2				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	300	
3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100	

Uraian penjelasan tabel :

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tinggi hanya beberapa saja yang masih dibawah target dikarenakan terdapat kesenjangan informasi yang menyebar di masyarakat maupun kesenjangan data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya di tahun tahun yang akan datang Diskominfo selaku lembaga yang mendukung *smart governance* melalui

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan melakukan strategi dan kebijakan melalui pengembangan infrastruktur, jalur media informasi dan kualitas data statistic.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.750.648.150	3.356.550.475	89.49
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	171.072.000	165.465.462	96.72
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.595.734.464	2.500.728.481	96.34
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	111.759.650	97.422.775	87.17
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.812.100	30.584.250	80.88
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	188.800.000	181.151.529	95.95
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.590.146.662	4.522.605.767	98.53
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.290.000	2.264.000	98.86
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	473.378.100	440.089.700	92.97
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.827.200	184.535.543	86.3

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.869.870	220.919.870	99.13
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.621.305.000	1.435.340.384	88.53
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.510.050	348.912.114	89.35
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.939.448.150	3.537.702.004	89.8
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.595.734.464	2.500.728.481	96.34
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	111.759.650	97.422.775	87.17
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.552.138.982	7.185.251.628	95.14
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	171.072.000	165.465.462	96.72

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	60	82.51	137.51	4.110.520.150	3.703.167.466	90.09	47,42%
2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	90	56.22	62.47	2.595.734.464	2.500.728.481	96.34	33,87 %

3	Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi	55	29	52.73	111.759.650	97.422.775	87.17	34,44 %
1	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan "Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan"	83	83.72	100.87	7.552.138.982	7.185.251.628	95.14	8,73 %
6	Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	77	62.07	80.61	7.552.138.982	7.185.251.628	95.14	17,58 %
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan "indeks SPBE"	3.2	1.89	59.06	6.818.014.264	6.301.318.722	92.42	33,38%

Uraian penjelasan tabel:

- Capaian Indikator Sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah dengan persentase capaian kinerja sebesar 137,51% dan persentase capaian anggaran sebesar 90,09% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 47,42%
- Capaian Indikator Sasaran Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 62,47% dan persentase capaian anggaran sebesar 96,34% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 33,87%
- Capaian Indikator Sasaran Tersedianya Sistem Data Statistik Daerah Yang Handal, Efektif Dan Efisiensi dengan persentase capaian kinerja sebesar 52,73% dan persentase capaian anggaran sebesar 87,17% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 34,44%
- Capaian Indikator Sasaran Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,87% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,14% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 8,73%
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan persentase capaian kinerja sebesar 77,56% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,14% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 17,58%
- Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan persentase capaian kinerja sebesar

77,56% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,14% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 17,58%

- Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan dengan persentase capaian kinerja sebesar 59,06% dan persentase capaian anggaran sebesar 92,42% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 33,38%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA menetapkan sebanyak 2 tujuan, 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 “Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan” dengan indikator “Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik” dengan capaian kinerja sebesar 59.06% (Rendah)
- Tujuan 2 “Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika” dengan indikator “Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatik” dengan capaian kinerja sebesar 80.61% (kategori Tinggi)
- Sasaran 1 Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran:
Indikator 1 Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 137.51% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 2 Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah terdiri dari 1 indikator kinerja Persentase jumlah berita dipublikasikan dengan capaian kinerja sebesar 62,47% (kategori Rendah)

- Sasaran 3 Tersedianya statistik daerah terdiri dari 1 indikator kinerja prosentase jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan dengan capaian kinerja sebesar 52,73% (kategori Rendah)
- Sasaran 3 Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan terdiri dari 1 indikator kinerja Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan dengan capaian kinerja sebesar 100,87% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.370.153.246 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.487.110.350 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 93,86% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,14%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 26 Februari 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Dr. Agus Sugianto Zein, S.Pd., M.Si
NIP. 196408141897031012